



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : Tahun 2021
TANGGAL : Agustus 2021

T E N T A N G

RENCANA STRATEGI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2021 – 2026

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ANAK KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjarkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dapat tersusun. Rencana Strategis (Renstra) ini adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat target, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun kedepan. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Renstra BKKBN secara nasional dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026. Semoga kedepan dokumen Renstra yang sudah tersusun ini dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Sipirok, 11 Juni 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,



AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199602 1 003

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
DAFTAR TABEL	lii
BAB I	1
:	PENDAHULUAN.....
1.1.	Latar Belakang.....
1.2.	Landasan Hukum.....
1.3.	Maksud dan Tujuan.....
1.4.	Sistematika Penulisan.....
BAB II	8
:	GAMBARAN UMUM PELAYANAN PENGENDALIAN DAN KB.....
2.1.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.2.	Sumber Daya.....
2.3.	Kinerja Pelayanan.....
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....
BAB III	32
:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....
3.2.	Isu Strategis
3.3.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....
3.4.	Telaahan Renstra.....
3.5.	Telaahan RTRW dan KLHS.....
BAB IV	48
:	TUJUAN DAN SASARAN.....
4.1.	Tujuan Jangka Menengah.....
4.2.	Sasaran
BAB V	59
:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....
5.1.	Strategi
5.2.	Arah Kebijakan
BAB VI	61
:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	62
:	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....
BAB VIII	63
:	PENUTUP.....

DAFTAR TABEL

	Hal.
TABEL 1 : Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24
TABEL 2 : Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2016 - 2020	26
TABEL 3 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2020.....	26
TABEL 4 Rasio Akseptor KB Tahun Tahun 2016 - 2020	27
TABEL 5 Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Tapanuli Selatan.....	28
TABEL 6 Kelompok Ketahanan Keluarga Per Kecamatan Tahun 2020....	28
TABEL 7 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan	29
TABEL 8 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	51
TABEL 9 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	61
TABEL 10 Indikator Kinerja Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 1 Ayat (29) disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai bagian integral RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan setiap tahun, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui proses sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah integrasi dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2021-2026 setelah memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2020-2024, Rencana Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2023, RTRW Provinsi Sumatera Utara, RTRW Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2017-2037 dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2006-2025 yang menampung aspirasi pemangku kepentingan serta strategi, arah kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengimplementasikannya akan diwujudkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah yang secara bertahap diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2021-2026 yakni “Kabupaten

Tapanuli yang Maju, Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari” khususnya misi ke-1.

Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 ini adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Kabupaten Tapanuli Selatan [Rancangan Awal Rpjmd Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026] BAB I Pendahuluan I - 6 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Tapanuli Selatan [Rancangan Awal RPJMD Kabupaten

- Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026] BAB I Pendahuluan I - 7 Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.
 26. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017;
 27. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 28. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
 29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Grand design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2045.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini adalah untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terukur, terarah, sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai. .

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga dapat lebih terarah dan terukur, tepat waktu, bermutu dan tepat sasaran.
- b. Sebagai alat/media dalam menimplementasikan program-program RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
- c. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Dinas Pengendalian dan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026 ini terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.5 Telaahan RTRW dan KLHS
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
 - 4.1 Tujuan Jangka Menengah
 - 4.2 Sasaran
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - 5.1. Strategi
 - 5.2. Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2016 dengan uraian tugas pokok dan fungsi.

❖ Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten.

❖ Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
- d) Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- e) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- f) Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB.

- g) Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
- h) Pelaksanaan pelayanan KB.
- i) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- j) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- k) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan
- l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang-bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta kesekretariatan.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Menyenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Membina, mengkoordinasikan dan mengelola data dan informasi yang terkait dengan Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
6. Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam tugasnya;
7. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Dinas;
8. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;
9. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Dinas;

10. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; Menilai prestasi kerja Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
12. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha.
- b) Koordinasi penyusunan perencanaan.
- c) Pengelolaan administrasi keuangan.
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- e) Pengelolaan administrasi perlengkapan
- f) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protocol.
- g) Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang.
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana.
- i) Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum/urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha.
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/asset.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan urusan umum dan kepegawaian.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta verifikasi, pembukuan dan pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- b. Membuat Perjanjian Kinerja Bidang-Bidang.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Kas Kegiatan di Lingkungan Dinas.
- e. Menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja dinas.
- f. Melaksanakan administrasi pemungutan, pemetaan dan pelaporan pajak-pajak.

- g. Melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan dinas.
- h. Melaksanakan akuntansi keuangan dinas.
- i. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup dinas.
- k. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dinas.
- l. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati.
- m. Mengkoordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHKIP, dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

III. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan Daaerah Kabupaten.

Dalam Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- c. Pelaksanaan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten dan kota
- f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a) Seksi Advokasi dan Pergerakan

Seksi Advokasi dan pergerakan mempunyai tugas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Advokasi dan pergerakan.

Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Advokasi dan Pergerakan.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Advokasi dan Pergerakan
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang Advokasi dan Pergerakan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Advokasi dan Pergerakan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

b) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB/KKB

Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB/KKB mempunyai tugas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, evaluasi

dan pelaporan di bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB/KKB.

Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB/KKB menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria pendayagunaan PKB/PLKB/KKB.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria pendayagunaan PKB/PLKB/KKB
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang pendayagunaan PKB/PLKB/KKB.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendayagunaan PKB/PLKB/KKB.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

IV. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana
- c) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana
- d) Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten dan kota
- e) Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten /Kota
- f) Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten /Kota
- g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana
- h) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana
- i) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
- j) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana
- k) Pelaksanaan administrasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- a) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat, Obat dan Kontrasepsi**

Seksi Pengendalian dan pendistribusian alkon mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pendistribusian alkon.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang pengendalian dan pendistribusian alkon menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria pengendalian dan pendistribusian alkon.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria pengendalian dan pendistribusian alkon
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang pengendalian dan pendistribusian alkon.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian dan pendistribusian alkon.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

b) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan pelayanan KB.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang jaminan pelayanan KB menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria jaminan pelayanan KB.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria jaminan pelayanan KB
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang jaminan pelayanan KB.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang jaminan pelayanan KB.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

c) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB

Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB mempunyai tugas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan evaluasi

dan pelaporan di bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

V. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- d. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- e. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita.
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan kerahanan remaja .
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan.

- i. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
 - j. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - k. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
 - l. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
 - m. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - n. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- a) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera**

Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera mempunyai tugas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
 - b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- b) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia**

Seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia mempunyai tugas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan evaluasi

dan pelaporan di bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

c) Seksi Bina Ketahanan Remaja

Seksi bina ketahanan remaja mempunyai tugas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Ketahanan Remaja.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria Bina Bina Ketahanan Remaja.
- b. Pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan Bina Ketahanan Remaja
- c. Penyelenggaraan evaluasi dinas di bidang Bina Ketahanan Remaja.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Bina Ketahanan Remaja.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

VI. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

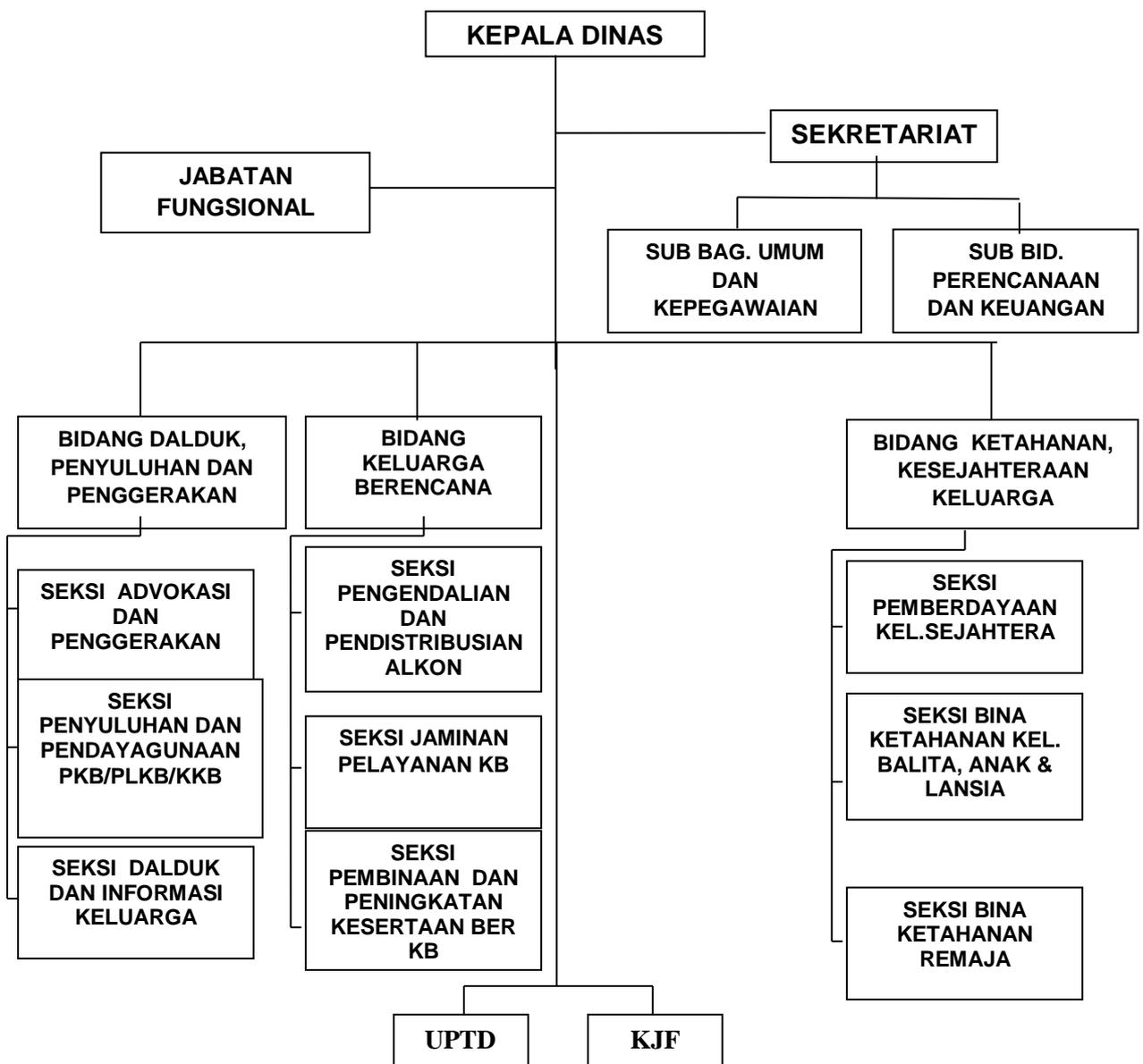
Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

VII. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dalam Bagan di bawah ini.



2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keberhasilan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlepas dari sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

Sumber daya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus memenuhi jumlah, mutu dan penyebaran petugas lapangan, disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kegiatan-kegiatan dalam sumber daya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berupa perencanaan, kebutuhan tenaga (petugas), peningkatan kemampuan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan pembinaan tenaga Keluarga Berencana.

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

a) Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Sebagai berikut :

No.	Pegawai	L	P	JUMLAH
1	PNS	14	28	42
2	CPNS	-	-	-
3	Honor Daerah	-	1	1
4	Honor Provinsi (PLKB)	-	-	-
5	Out scorching	5	19	24
Jumlah		19	48	67

b) Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Pendidikan	L	P	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S-2)	4	5	9
2	Sarjana (S-1)	16	13	29
3	Sarjana Muda / D3	1	12	13
4	D-1 / D-2	-	-	-
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	3	12	15
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-
7	Sekolah Dasar (SD)	-	1	1
Jumlah		24	43	67

c) Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	L	P	JUMLAH
1	Golongan IV	2	2	4
2	Golongan III	7	23	30
3	Golongan II	1	7	8
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		17	10	32

d) Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No.	Diklat	L	P	JUMLAH
1	ADUMLA / DIKLAT PIM IV	-	-	-
2	SPAMA / DIKLAT PIM III	1	1	2
Jumlah		2	1	-

e) Berdasar Eselon

No.	Eselon	L	P	JUMLAH
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	1	3	4
3	Eselon IV	7	4	11
Jumlah		8	8	16

f) Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PPLKB)

No.	Kecamatan	L	P	JUMLAH
1	Batang Angkola	1	1	2
2	Sipirok	-	2	2
3	Sipirok Dolok Hole	-	1	1
4	Angkola Timur	-	2	2
5	Angkola Barat	-	2	2
6	Angkola Selatan	-	3	3
7	Marancar	-	1	1
8	Batang Toru	-	1	1
9	Sayur Matinggi	1	1	2
10	Arse	-	2	2
11	Muara Batang Toru	2	0	2
12	Aek Bilah	-	-	-
13	Angkola Sangkunar	-	2	2
14	Tantom Angkola	-	2	2
15	Angkola Muaratais	-	1	1
Jumlah		4	21	25

2.2.2. Sumber Daya Asset/Modal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Gedung Tempat Kerja	16 Unit
2	Kendaraan Roda 4	7 Unit
3	Kendaraan Roda 2	74 Unit
4	Meja	57 Buah

5	Kursi	100 Buah
6	Laptop	13 Unit
7	Personal Computer (PC)	7 Unit
8	Proyektor	15 Unit
9	Telephon Mobil (Smartphon)	14 Unit
Jumlah		

Sasaran hasil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Mewujudkan Revolusi Mental Pembangunan Kebudayaan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel : 1

TAHUN	INDIKATOR SASARAN								
	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)			Persentase Peserta KB Aktif (MKJP) (%)			Jumlah Keluarga Sejahtera yang Mendapat Bantuan (Kelompok)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2016	0,92	0,66	139,39	21,19	21,19	100,00	5	5	100,00
2017	0,91	0,91	100,00	21,70	21,70	100,00	5	2	40,00
2018	1,63	0,60	271,67	22,30	22,30	100,00	5	3	60,00
2019	1,61	0,39	412,82	23,50	23,50	100,00	5	0	0,00
2020	1,58	0,45	351,11	24,30	25,44	104,69	5	0	0,00

Sumber : Dinas PP dan KB Kab.Tapsel

Secara umum Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan pada periode 2016 – 2021 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa Penyelenggaraan urusan Bidang pengendalian penduduk dan KB termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Kewenangan penyelenggaraan dilaksanakan secara konkuren yakni menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara terinci pembagian kewenangan tersebut

tertuang dalam lampiran huruf (N) Undang-undang ini ditetapkan bahwa terdapat 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu :

1. Pengendalian Penduduk :
 - a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian kuantitas penduduk.
 - b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota
2. Keluarga Berencana (KB) :
 - a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
 - b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
 - c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.
 - d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan
3. Keluarga Sejahtera :
 - a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4. Standarisasi Pelayanan dan Sertifikasi.

Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan pada periode 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Salah satu indikator keberhasilan program Bangga Kencana adalah penurunan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk, yang dalam

hal ini dicerminkan dalam rata-rata jumlah laju pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari tabel dibawah diketahui bahwa rata-rata jumlah penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung turun dari 0,66 pada tahun 2016 menjadi 0,45 pada tahun 2020.

Tabel : 2
Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Kedaaan Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	302.520	305.276	310.274	311.492	312.924
		290.321	302.520	305.276	310.274	311.492
		0,66	0,91	1,61	0,39	0,45

Sumber : Dinas PP dan KB Kab.Tapsel

Jumlah penduduk Tapanuli Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 311.492 jiwa pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mencapai 312.924 Jiwa. Peningkatan ini tentu saja berasal dari pertumbuhan penduduk alami melalui kelahiran dan pertumbuhan penduduk melalui migrasi. Data rata-rata jumlah penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 3
Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2019	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020
1	Batang Angkola	22.052	22.059	0,03
2	Sayur Matinggi	27.228	27.123	0,38
3	Angkola Timur	22.334	22.322	0,05
4	Angkola Selatan	33.234	33.643	1,23
5	Angkola Barat	26.393	26.122	1,02
6	Batang Toru	35.004	35.165	0,45
7	Marancar	10.579	10.645	0,62
8	Sipirok	34.406	34.833	1,24
9	Arse	9.004	8.878	1,39
10	Saipar Dolok Hole	14.395	14.589	1,34
11	Aek Bilah	7.629	7.572	0,74
12	Muara Batang Toru	16.003	16.776	4,83
13	Tano Tombangan Angkola	16.010	16.026	0,09
14	Angkola Sangkunur	23.042	23.085	0,18
15	Angkola Muaratais	14.179	14.086	0,65
	Jumlah	311.492	312.924	0,45

Sumber : Dinas PP dan KB Kab.Tapsel

Dari Tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan penduduk di

Tapanuli Selatan sebesar 0,45 persen pada tahun 2020 dengan pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Muara Batang Toru dengan capaian pertumbuhan penduduk sebesar 4,83 persen.

b. Peserta KB Aktif (MKJP)

Peserta KB Aktif (MKJP) di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 Peserta KB Aktif (MKJP) berjumlah 9.542 atau 21,19 % meningkat menjadi 11.938 atau 32,94 % pada tahun 2020. Sedangkan Peserta KB Aktif (MKJP) menurut kecamatan pada tahun 2020, menunjukkan bahwa Kecamatan Arse memiliki Peserta KB Aktif (MKJP) terbesar yakni 44,54 % dan Kecamatan Muara Batang Toru memiliki Peserta KB Aktif (MKJP) terkecil yakni 22,65 %. Perkembangan Peserta KB Aktif (MKJP) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel : 4
Peserta KB Aktif (MKJP) Tahun Tahun 2016 - 2020

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peserta KB Aktif (MKJP)	9.542	9.943	10.212	10.689	11.938
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	38.443	43.264	43.581	45.649	46.920
3	Persentase Peserta KB Aktif (MKJP)	21,19	32,62	30,12	30,69	32,94

Sumber : Dinas PP dan KB Kab.Tapsel

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Persentase Peserta KB Aktif (MKJP) di Kabupaten Tapanuli Selatan 21,19 pada tahun 2016 menjadi 32,62 pada tahun 2017, kemudian menjadi 30,12 pada tahun 2018 dan menjadi 30,69 pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 Persentase Peserta KB Aktif (MKJP) menjadi 32,94. Persentase Peserta KB Aktif (MKJP) per Kecamatan dalam tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 5
Peserta KB Aktif (MKJP) Menurut Kecamatan Tahun 2020
Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Kecamatan	Jumlah Peserta KB Aktif (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur	Persentase Peserta KB Aktif (MKJP)
1	Batang Angkola	553	2.812	34,13

2	Sayur Matinggi	602	3.224	27,05
3	Angkola Timur	1.067	3.908	37,63
4	Angkola Selatan	1.344	4.850	31,69
5	Angkola Barat	1.128	4.178	32,02
6	Batang Toru	1.056	4.542	32,84
7	Marancar	423	1.556	34,85
8	Sipirok	1.305	4.899	38,40
9	Arse	837	2.107	34,54
10	Saipar Dolok Hole	685	2.543	38,61
11	Aek Bilah	337	1.608	34,62
12	Muara Batang Toru	566	2.543	22,65
13	Tantom Angkola	779	2.732	30,91
14	Angkola Sangkunur	877	3.565	28,61
15	Angkola Muaratais	389	1.853	31,75
Jumlah		11.938	46.920	32,94

Sumber : Dinas PP dan KB Kab.Tapsel

c. Keluarga Sejahtera

Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sejahtera dan berkualitas melalui Program Kampung KB (kampung keluarga berkualitas) di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat terlaksana dengan harapan terwujudnya keluarga di Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkualitas dengan menurunkan penduduk miskin melalui peningkatan ekonomi keluarga, menurunkan angka perceraian dan menurunkan jumlah dan persentase keluarga yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (pra sejahtera) serta mampu menjalankan delapan fungsi keluarga.

Adapun Daftar Kelompok Ketahanan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut Kecamatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Kelompok Ketahanan Keluarga Per Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	JUMLAH POKTAN				
		BKB	BKR	BKL	PIK-R	UPPKS
1	Batang Angkola	21	21	2	2	5
2	Sayur Matinggi	11	4	4	1	4
3	Angkola Timur	8	11	11	3	4
4	Angkola Selatan	10	7	1	3	4
5	Angkola Barat	5	5	4	1	4
6	Batang Toru	5	3	2	1	3
7	Marancar	5	5	5	3	4
8	Sipirok	5	1	1	1	5
9	Arse	3	1	1	1	4
10	Saipar Dolok Hole	2	2	1	1	1
11	Aek Bilah	3	1	1	1	1
12	Muara Batang Toru	6	4	5	1	3
13	Tano Tombangan Angkola	9	7	3	1	3
14	Angkola Sangkunur	5	7	5	1	3

15	Angkola Muaratais	13	13	1	12	4
Jumlah		111	92	47	33	52

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

Tabel : 7
**REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

No.	Indikator kinerja fungsi	Tar get SPM	Tar get IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	-	-	-	0,92	0,91	1,63	1,61	1,58		0,66	0,91	0,60	0,39	0,45		139,39	100,00	271,67	412,82	351,11	
2	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga (Orang)	-	-	-	2,10	2,08	2,06	2,04	2,02		2,10	2,08	2,06	2,04	2,02		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rasio Akseptor KB (%)	-	-	-	66,08	67,46	68,85	70,24	71,62		66,28	71,84	74,78	76,29	77,25		100,30	106,49	108,61	108,61	107,86	
4	Cakupan Penyuluhan KB (%)	-	-	-	70,00	70,00	80,00	90,00	100,00		70,00	70,00	80,00	90,00	90,00		100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	
5	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Orang)	-	-	-	2,33	2,33	2,31	2,28	2,26		2,36	2,33	2,31	2,28	2,57		98,73	100,00	100,00	100,00	87,94	
6	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/CPR) (%)	-	-	-	60,70	60,90	61,10	61,30	61,50		60,70	60,90	74,78	76,29	77,22		100,00	100,00	122,39	124,45	125,56	
7	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	-	-	-	10,48	10,26	10,14	9,91	9,90		10,48	10,26	10,14	9,30	11,65		100,00	100,00	100,00	106,56	84,98	
8	Persentase Peserta KB aktif (PA) MKJP (%)	-	-	-	21,19	21,70	22,30	23,50	24,30		21,19	21,70	22,30	23,50	25,44		100,00	100,00	100,00	100,00	104,69	
9	Cakupan Konseling Remaja yang Bermasalah (%)	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (%)	-	-	-	25,30	25,30	25,00	24,60	24,00		25,70	25,30	25,00	24,60	12,06		101,58	100,00	100,00	100,00	50,25	

Sumber : Dinas PP dan KB Kab.Tapsel

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Adapun tantangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada kondisi saat ini adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Penyuluh dilapangan sangat minim hanya 1 per kecamatan yang seharusnya rasio petugas terhadap desa/kelurahan adalah 1 orang Petugas membina 2 Desa/ Kelurahan.
2. Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat.
3. Rendahnya kompetensi Aparatur Kelembagaan KB dan Kependudukan di Daerah.
4. Minimnya Pelayanan Keluarga Berencana di Kecamatan.
5. Rendahnya kesadaran PUS dan Remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.
6. Belum terkendalinya tingkat kelahiran pada pasangan usia subur
7. Rendahnya kesadaran dan partisipasi pria untuk ber-KB.
8. Belum semua toga/toma mendapatkan pelatihan Advokasi KIE
9. Tidak adanya reward kepada kader IMP
10. Belum semua kelompok PIK KRR yang mendapat pelatihan
11. Rendahnya pembinaan terhadap bina keluarga
12. Rendahnya pembinaan tentang teknis kewirausahaan pada kelompok UPPKS.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai potensi sebagai Berikut :

1. Jumlah Penduduk Perempuan lebih besar dibanding laki - laki .
2. Adanya Institusi yang menangani tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Setiap desa/kelurahan memiliki toga/toma yang melakukan advokasi KIE.
4. Setiap desa/kelurahan memiliki pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD yang berperan aktif sebagai fasilitator KB Desa.

5. Kecamatan memiliki Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja
6. Adanya kelompok BKB, BKR, BKL dan BLK Percontohan disetiap kecamatan
7. Setiap Kecamatan memiliki Kelompok UPPKS
8. Memiliki sarana pelayanan KB sebanyak 71 Klinik KB
9. Memiliki sarana Kenderaan operasional roda 2 bagi PLKB
10. Tersedianya Mobil Unit Pelayanan KB

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan kajian pada dasarnya permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana belum optimal disebabkan :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB.
2. Faktor sosial budaya yang masih dianut kurang mendukung.
3. Belum optimalnya peran tokoh formal, tokoh informal dan institusi masyarakat.
4. Petugas lapangan (penyuluh KB) yang terbatas.
5. Informasi data mikro keluarga belum akurat.
6. Sikap suami yang berpendapat bahwa Program KB hanya untuk perempuan.
7. Rendahnya Pembinaan terhadap Petugas Lapangan KB.
8. Kurang lancarnya distribusi alat kontrasepsi
9. Kurang tepatnya prosedur pelayanan/strategi pelayanan
10. Penyediaan Alokasi yang terbatas
11. Rendahnya peserta KB Pria yang dilayani
12. Terbatasnya tenaga yang kompeten dalam pelayanan KB
13. Rendahnya sistem pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB
14. Belum optimalnya penggunaan smartphon oleh petugas Penyuluh lapangan dalam pelaporan hasil pelayanan KB.
15. Meningkatnya sifat tidak mau tau tentang hubungan sex diluar nikah
16. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai akibat negatif hubungan sex bebas termasuk resiko terkena PMS dan HIV/AIDS
17. Intertilitas akibat Aborsi dan PMS
18. Belum adanya pelayanan yang komprehensif untuk menangani remaja yang bermasalah.
19. Besarnya biaya pelayanan KB Swasta

20. Keterlambatan dalam pelaporan pelayanan KB Swasta
21. Terbatasnya petugas pencatat pelayanan KB Swasta
22. Rendahnya kerjasama dengan lintas sektoral dan swasta
23. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang program KB
24. Rendahnya jumlah promosi, publikasi dan KIE tentang Keluarga Berencana
25. Terbatasnya jumlah media yang memberitakan program KB
26. Rendahnya Pembinaan terhadap kelompok bina-bina
27. Rendahnya pendidikan tentang kelompok binan-bina
28. Rendahnya peluang akses terhadap informasi dan sumber daya ekonomi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana disebabkan :

1. Kurangnya Tenaga Penyuluh dilapangan dalam pelayanan keluarga berencana.
2. Terus meningkatnya laju pertumbuhan penduduk.
3. Rendahnya kompetensi Aparatur Kelembagaan KB dan Kependudukan di Daerah.
4. Minimnya Pelayanan Keluarga Berencana di Kecamatan.
5. Rendahnya kesadaran PUS dan Remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.
6. Belum terkendalinya tingkat kelahiran pada pasangan usia subur
7. Rendahnya kesadaran dan partisipasi pria untuk ber-KB.
8. Belum semua toga/toma mendapatkan pelatihan Advokasi KIE
9. Tidak adanya reward kepada kader IMP
10. Belum semua kelompok PIK KRR yang mendapat pelatihan
11. Rendahnya pembinaan terhadap bina keluarga
12. Rendahnya pembinaan tentang teknis kewirausahaan pada kelompok UPPKS

3.2. Isu Strategis

Berbagai isu strategis yang berkembang saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program/kegiatan pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 diantaranya adalah:

- 1) Isu strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - a. Bonus demografi; Pembangunan dalam periode tahun 2021- 2026 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM Pembangun yang sehat, cerdas dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan di arahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/total fertility rate (TFR). Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk.
 - b. Aging population; Perubahan struktur umur penduduk yang secara perlahan semakin “menua” merupakan salah satu dampak pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Jumlah dan proporsi lansia di Sumatera Utara berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia (PPI) 2010-2035 termasuk masih rendah (6,1% pada tahun 2025 dan 8,8% pada 2035) dan belum akan mengalami penduduk menua (aging population). Namun, keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat;
 - c. Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga; Kebijakan pembangunan manusia dilakukan Renstra 2021-2026 Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan pendekatan siklus hidup

dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Narasi ini, bahkan akan lebih komprehensif apabila dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang juga penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan); dan

- d. Satu data kependudukan; Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disatu sisi, Pendataan Keluarga (PK) yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, harus dapat diintegrasikan dengan data sektor lain, seperti Sensus Penduduk (SP), serta Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga dapat terwujud satu data yang lengkap baik guna mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, maupun untuk mendukung operasionalisasi program/kegiatan Bangsa Kencana di lini lapangan.
- 2) Isu Strategis terkait pemenuhan layanan dasar;
 - a. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi; Kondisi kesehatan ibu dan anak juga belum menunjukkan hal yang menggembirakan. Situasi ini harus mendapat perhatian khusus serta membutuhkan kerja keras bersama (lintas sektor dan melibatkan pihak swasta dan

masyarakat) untuk terus menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Salah satu penyebab tingginya AKI adalah 4 (empat) terlalu, yakni terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat dan terlalu tua. Kehamilan yang tidak diinginkan di usia muda akan sangat berisiko pada kematian atau dapat berdampak buruk pada bayi yang dikandungnya. Risiko tersebut dapat diminimalkan dengan operasionalisasi Program Bangga Kencana yang tepat. Salah satunya dengan memastikan individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro), dan layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal;

- b. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern; Diperkirakan penyebab utama menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan tepercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern). Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan CPR, diantaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyoal pasangan usia muda/pasangan millennial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini;
- c. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya para remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai

proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih relative tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga.

- d. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) di Kabupaten Tapanuli Selatan dikategorikan masih tinggi. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, unmet need terus mengalami penurunan walaupun terjadi fluktuasi di antara tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2018, posisi unmet need sebesar 10,14 persen, turun menjadi 9,30 persen pada tahun 2019, naik menjadi 11,65 persen pada tahun 2020.
- e. Prevalensi stunting masih tinggi: Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Pemerintah tetap harus memberikan perhatian serius terhadap isu ini, terutama

agar anak-anak di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat nasional. Kemudian salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik.

- 3) Isu Strategis terkait membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
 - a. Keluarga yang mengetahui fungsi keluarga: Peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa diharapkan menuju angka yang menggembirakan, hal ini terlihat dari jumlah keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga di Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun 8 fungsi keluarga tersebut adalah: (1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan (Peraturan Pemerintah No: 87 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga). Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pembentukan dan pengembangan karakter manusia Indonesia yang positif; dan
 - b. Pernikahan usia anak: Kasus pernikahan usia anak banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dan telah menjadi perhatian internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan anak yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia anak, kehamilan pada usia yang sangat muda, gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian

kekerasan dan keterlantaran, infeksi penyakit menular seksual, serta risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia yang relatif sangat muda. Permasalahan lain, perkawinan anak di bawah usia 15 tahun tidak mencerminkan prevalensi yang sesungguhnya, karena banyak perkawinan disamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun. Perkawinan anak juga akan berdampak besar pada generasi yang selanjutnya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Keadaan ekonomi rendah akan mengakibatkan sulitnya akses terhadap fasilitas penunjang keterampilan dan pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, pangan dan gizi serta akses terhadap lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Langkah penanggulangan isu ini diantaranya dapat melalui penanaman norma sosial dan budaya praktik penundaan usia menikah melalui keluarga (orang tua), kelompok kegiatan, pendidikan/sosialisasi kesehatan reproduksi melalui sekolah/guru, serta tokoh agama/tokoh masyarakat

3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mencermati visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap I Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025 yaitu : **“Tapanuli Selatan yang Maju, Adil berlandaskan Agama dan Adat Budaya”**.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

“Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”.

Penjelasan makna atas pernyataan Visi di atas adalah:

- 1. Tapanuli Selatan yang Maju** mengandung arti yakni Tapanuli Selatan harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik pada semua aspek kehidupan.
- 2. Sumber Daya Manusia Pembangun** mengandung arti yakni bahwa kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan Selatan harus ditopang dan berbasis sumber daya manusia pembangun yang artinya sumber daya manusia yang ada harus mampu membangun, mendirikan atau membina sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan komprehensif dalam berpikir serta selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, rela berkorban, hidup torelan, berperilaku terpuji dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai bidang dan sektor pembangunan.

Kata “Sehat – Cerdas – Sejahtera” sengaja dikutip sebagai penekanan bahwa sumber daya manusia yang unggul tersebut dapat diartikan sebagai manusia yang sehat, cerdas, sejahtera yang kreatif dan inovatif serta selalu aktif mencari hal-hal baru demi kemajuan masyarakat dan daerah Tapanuli Selatan.

- 3. Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari**, mengandung arti bahwa sumber daya alam yang ada harus mendatangkan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita harus lestari dalam arti memenuhi prinsip berkelanjutan yang ditandai dalam pemanfaatan sumber daya alam yang produktif tetap memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga pembangunan yang akan datang tidak hanya untuk kepentingan sesaat tetapi juga kelestarian alam dan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan misi Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026 yakni :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya local yang produktif dan berwawasan lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas social dan umum masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi di atas adalah :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri sebagai pondasi utama pembangunan, maka rencana pembangunan ke depan difokuskan pada upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, derajat kesehatan, serta pengembangan adat, budaya dan kearifan lokal dalam semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan.

Misi 2 : Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan

dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan-produktifitas pertanian dan perikanan, pengembangan industri pengolahan dan ekonomi kreatif yang menggunakan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan, perdagangan barang dan jasa, serta investasi daerah.

Misi 3 : Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya dengan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah daerah dan atasan, dunia usaha dan partisipasi masyarakat.

Misi 4 : Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan dilakukan secara baik, bersih dan berwibawa serta dapat dipertanggungjawabkan, kerja sama antar daerah dalam pemerintahan dan pembangunan.

Misi 5: Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka peningkatan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan hidup dalam masyarakat, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas hidup,

perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat, kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan.

Berdasarkan telaahan dari Visi, Misi Bupati Tapanuli Selatan 2021-2026 maka diperoleh beberapa kata kunci yang menjadi dasar dalam penyusunan Program dan Kegiatan dalam Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2026, dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta isu-isu strategis yang akan menjadi hambatan dan tantangan lima tahun ke depan.

Berdasarkan uraian diatas berikut disajikan permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dalam perumusan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang merupakan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan daerah memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Setelah menelaah kajian data dan informasi serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni: “Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan”. Permasalahan utama pembangunan

Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah
3. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan.

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun berdasarkan Renstra Strategis BKKBN Tahun 2020-2024 dan berpedoman kepada Renstra BKKBN Propinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta memperhatikan aspirasi masyarakat dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa Penyelenggaraan urusan Bidang pengendalian penduduk dan KB termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Kewenangan penyelenggaraan dilaksanakan secara konkuren yakni menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara terinci pembagian kewenangan tersebut tertuang dalam lampiran huruf (N) Undang-undang ini ditetapkan bahwa terdapat 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu :

1. Pengendalian Penduduk :
 - a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian kuantitas penduduk.
 - b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota

2. Keluarga Berencana (KB) :
 - a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
 - b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
 - c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.
 - d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan

3. Keluarga Sejahtera :
 - a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

4. Standarisasi Pelayanan dan Sertifikasi

3.5. Telaahan RTRW dan KLHS

A. Faktor Penghambat.

Secara administrative Kabupaten Tapanuli Selatan berbatasan dengan 6 (enam) Kabupaten sehingga masyarakat yang menetap di daerah perbatasan sering dihadapkan pada permasalahan-permasalahan baik pelayanan KB maupun rujukan, penanggulangan masalah komplikasi pemakaian alat/obat kontrasepsi. Pelayanan kontrasepsi di wilayah perbatasan masih kurang terorganisasi dan terkoordinasi sehingga mengakibatkan tingginya pertumbuhan penduduk untuk itu perlu satu pengaturan dalam menangani

permasalahan yang timbul yang dituangkan dalam suatu kerjasama lintas wilayah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

B. Faktor Pendorong

1. Sasaran Program.

Sasaran langsung program adalah masyarakat diwilayah perbatasan dengan tujuan program untuk meningkatkan mutu pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di daerah perbatasan.

Tersusunnya suatu Pola Prosedur (Protap) tentang pelayanan diwilayah lintas batas yang merupakan implementasi dari hubungan koordinasi pemerintah daerah sesuai dengan hak kewajiban serta kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berpedoman kepada peraturan pemerintah No 50 Tahun 2007 tentang cara kerjasama antara daerah dan Permendagri No 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis kerjasama antar daerah.

2. Program Pembangunan dan Kegiatan Pokok Program.

Kerjasama antar lintas batas bidang program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dimaksudkan untuk terwujudnya program yang sinergis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang meliputi sebagai berikut :

- Operasional pelayanan KB di daerah Perbatasan
- Pertemuan koordinasi pelayanan KB wilayah perbatasan tingkat propinsi
- Pelayanan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja.

3. Indikator Kinerja

Dengan terbentuknya program kerjasama lintas wilayah diharapkan tidak adanya lagi permasalahan pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di daerah perbatasan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah

Adapun Tujuan Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

1. Perwujudan Keluarga Berkualitas.
2. Untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).

Sedangkan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

4.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Strategis tersebut di atas akan dijabarkan di dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Kemudian dalam implementasinya upaya pencapaiannya dijabarkan pada level komponen sebagai penghubung dalam penugasan berbagai kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Tabel : 8
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TAPANULI SELATAN

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul dan Mandiri Berdasarkan ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ)	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatkan Implementasi Pemantuan dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	1. Tersedianya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Kabupaten Tapanuli Selatan 2. Meningkatnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan Kearifan Dan Budaya Lokal	Dinas Dalduk dan KB

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-					Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,28%	0,25%	0,24%	0,23%	0,23%	
				TFR (Angka Kelahiran Total)	2,55	2,54	2,53	2,52	2,52	
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (%)	100	100	100	100	100	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (%)	100	100	100	100	100	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK Tingkat Kab/Kota (Dokumen)	1	1	1	1	1	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026

										Penggerakan
				Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (%)	100	100	100	100	100	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (%)	70	70	70	70	70	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal (%)	70	70	70	70	70	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (%)	70	70	70	70	70	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (%)	80	80	80	80	80	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Non formal dan Informal (%)	80	80	80	80	80	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal (%)	80	80	80	80	80	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (%)	80	80	80	80	80	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (%)	80	80	80	80	80	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Sosialisasi Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (%)	80	80	80	80	80	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026

				Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (%)	80	80	80	80	53	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK (%)	80	80	80	80	80	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	100	100	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Perumusan Parameter Kependudukan (%)	80	80	80	80	80	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (%)	100	100	100	100	100	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Penyusunan Profil KKBPK (Dokumen)	1	1	1	1	1	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Pemetaan Kependudukan (%)	80	80	80	80	80	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	1	1	1	1	1	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Pengembangan Model solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (%)	80	80	80	80	80	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini) (%)	80	80	80	80	80	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor lain (Jumlah)	19	19	19	19	19	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026

				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (%)	100	100	100	100	100	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (%)	100	100	100	100	100	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (%)	100	100	100	100	100	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (%)	100	100	100	100	100	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (%)	100	100	100	100	100	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK (%)	100	100	100	100	100	Bidang Dalduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
				Persentase peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri (%)	31,08	31,59	31,18	34,26	34,68	Bidang KB
				Persentase Peserta KB Aktif/MKJP (%)	34,30	35,75	35,85	35,90	35,90	Bidang KB
				Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) (%)	11,36	11,22	11,09	10,97	10,86	Bidang KB
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal (%)	100	100	100	100	100	Bidang KB
				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja (%)	70	70	70	70	70	Bidang KB
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	80	80	80	80	80	Bidang KB	

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026

			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK (%)	100	100	100	100	100	Bidang KB
			Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	80	80	80	80	80	Bidang KB
			Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) (Kali)	2	2	2	2	2	Bidang KB
			Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK (%)	80	80	80	80	80	Bidang KB
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rakorcam, Rakordes dan Minikarya (Minilok) (%)	70	70	70	70	70	Bidang KB
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	100	100	100	100	100	Bidang KB
			Pengendalian Program KKBPK (%)	100	100	100	100	100	Bidang KB
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (KB/PLKB) (%)	100	100	100	100	100	Bidang KB
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB (%)	80	80	80	80	80	Bidang KB
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (%)	100	100	100	100	100	Bidang KB
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk PKB/PLKB (%)	100	100	100	100	100	Bidang KB
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (%)	80	80	80	80	80	Bidang KB
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota (%)	80	80	80	80	80	Bidang KB
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (%)	80	80	80	80	80	Bidang KB
			Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang	80	80	80	80	80	Bidang KB

			Pelayanan KB (%)							
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	80	80	80	80	80	80	Bidang KB
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (%)	70	70	70	70	70	70	Bidang KB
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (%)	80	80	80	80	80	80	Bidang KB
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	80	80	80	80	80	80	Bidang KB
			Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (%)	100	100	100	100	100	100	Bidang KB
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Jejaringnya (%)	80	80	80	80	80	80	Bidang KB
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta hak-hak reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan (%)	80	80	80	80	80	80	Bidang KB
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (%)	80	80	80	80	80	80	Bidang KB
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergeerak (%)	100	100	100	100	100	100	Bidang KB
			Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran (%)	80	80	80	80	80	80	Bidang KB
			Peningkatan Kesertaan KB Pria (%)	70	70	70	70	70	70	Bidang KB
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB (%)	80	80	80	80	80	80	Bidang KB
			Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	80	80	80	80	80	80	Bidang KB

				Pembinaan kesertaan ber-KB (%)							
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (%)	80	80	80	80	80		Bidang KB
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB (%)	100	100	100	100	100		Bidang KB
				Pembinaan Terpadu Kampung KB (%)	80	80	80	80	80		Bidang KB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah keluarga sejahtera yang mendapat bantuan (Kelompok)	5	5	5	6	6		Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (%)	80	80	80	80	80		Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS (%)	80	80	80	80	80		Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
				Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS (%)	70	70	70	70	70		Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS (%)	80	80	80	80	80		Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS (%)	80	80	80	80	80		Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
				Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS (%)	70	70	70	70	70		Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
				Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi	70	70	70	70	70		Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga

			Keluarg/UPPKS (%)							
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS (%)	70	70	70	70	70	70	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (%)	70	70	70	70	70	70	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
			Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK (%)	80	80	80	80	80	80	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
			Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK (%)	100	100	100	100	100	100	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
			Advokasi dan Promosi IPK (%)	80	80	80	80	80	80	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
			Sosialisasi IPK (%)	80	80	80	80	80	80	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
			Pelaksanaan Koordniasi Evaluasi Pencapaian IPK (%)	80	80	80	80	80	80	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Oranisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (%)	80	80	80	80	80	80	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
			Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS (%)	80	80	80	80	80	80	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026

				Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS (%)	80	80	80	80	80	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS (%)	80	80	80	80	80	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (%)	80	80	80	80	80	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (%)	100	100	100	100	100	
				Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	80	80	80	80	80	

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Adapun strategi yang dilaksanakan dalam mencapai Visi Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas.
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang memadai disetiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB.
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE).
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB.
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan pergerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB.
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.

7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB.
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman umum pelaksanaan tindakan yaitu, ketentuan yang harus dijadikan pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dapat dijadikan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam periode lima tahun kedepan adalah

1. Peningkatan Cakupan dan Pelayanan KB yang Merata dan Berkualitas.
2. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK.
3. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Remaja.
4. Peningkatan Pembangunan Keluarga.
5. Penguatan Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi.
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 2. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengendalian Penduduk :
 1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
 2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) :
 3. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 4. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 5. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota.
 6. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB
- d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Program Penelitian dan Pengembangan :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

BAB VII

INDIKATOR KINERJA

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel : 10
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU)	Kondisi Kinerja awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2026	SKPD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	0,45	0,31	0,28	0,25	0,24	0,23	0,23	Dinas Dalduk dan KB
2.	TFR (Angka Kelahiran Total (Orang)	2,57	2,56	2,55	2,54	2,53	2,52	2,52	Dinas Dalduk dan KB
3.	Persentase Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri (%)	29,95	30,76	31,08	31,59	31,18	34,26	34,68	Dinas Dalduk dan KB
4.	Persentase Peserta KB Aktif (MKJP) (%)	32,94	33,58	34,30	35,75	35,85	35,90	35,90	Dinas Dalduk dan KB
5.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,65	11,50	11,36	11,22	11,09	10,97	10,86	Dinas Dalduk dan KB
6.	Jumlah Keluarga Sejahtera yang Mendapat Bantuan (Kelompok)	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	Dinas Dalduk dan KB

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan tolak ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

Semoga upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan Tahun 2026 dapat lebih terarah dan terukur. Kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2026 melibatkan seksi-seksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, untuk itu kiranya diberikan petunjuk dan saran sehat demi perbaikan Renstra ini.

Sipirok, 11 Juni 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,



AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199602 1 003

Lampiran : PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan KB Daerah Kab. Tapanuli Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
A	PENDAPATAN				
	Tercapainya pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang ditetapkan	1. Pajak Restoran 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
B	BELANJA				
			100%	1 Program Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan - Peringatan Hari Anak Nasional	101,800,000
			100%	2 Program Penataan Administrasi Kependudukan - Orientasi Pendataan Keluarga Berencana	344,518,000
			100%	3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menurut - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/ peneranangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah - Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	2,000,000 14,385,000 6,000,000 91,890,000 26,970,000 5,250,000 7,000,000 169,447,500 55,004,500 134,110,000
			100%	4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional - Pengadaan Mobeleur - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	300,050,000 26,000,000 67,220,000 10,000,000
			100%	5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	21,780,000
			100%	6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Formal	40,000,000
			100%	7 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja	20,000,000

				dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		
		100%	8 Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak			
			- Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak		179,340,000	
			- Orientasi PPKBD		258,200,000	
		100%	9 Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan			
			- Sosialisasi dan Pembuatan Komitemen Kota Layak Anak		64,850,000	
		100%	10 Program peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			
			- Pendidikan dan pelatihan peningkatan peranserta dan kesetaraan gender		65,100,000	
			- Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera		125,000,000	
			- Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak		77,800,000	
		100%	11 Program Keluarga Berencana			
			- Pelayanan KIE		33,600,000	
			- Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling		1,655,152,000	
			- Bhakti Sosial TNI-KB-Kesehatan terpadu		61,860,000	
			- Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan terpadu		97,420,000	
			- Peningkatan Ayoman Pasca Kegagalan Pemasangan Alkon		25,000,000	
		100%	12 Program Pelayanan Kontrasepsi			
			- Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK)		50,400,000	
			- Pelayanan Kontrasepsi Mantap(KONTAP) Pria dan Wanita		137,625,000	
		100%	13 Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			
			- Pelatihan UPPKS		62,664,000	
			- Penerangan KIE melalui sarana MUPEN KB		58,800,000	
		100%	14 Program Peningkatan Hari - hari Besar Keagamaan, Nasional dan Hari Besar Daerah			
			- Peringatan Hari Ibu		161,050,000	
			- Peringatan hari Kartini		54,200,000	
			- Peringatan HUT Tapanuli Selatan		41,500,000	
			- Peringatan Hari Keluarga		162,800,000	
		JUMLAH				4,815,786,000

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. SYAHRUL M PASARIBU

Hj. EMSI ERMIDA HASIBUAN, SE
NIP. 19660210 199203 2 003

TABEL 9
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Meningkatnya SDM dalam mengelola administrasi perkantoran yang baik, bersih dan berwibawa melalui reformasi yang berkesinambungan	Meningkatnya kapasitas, kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Terciptanya Administrasi yang baik, bersih dan berwibawa	1.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tercakupnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	10,279,899,494	100%	10,933,284,185	100%	11,083,777,645	100%	11,202,049,243	100%	11,353,789,290			
				1.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	3,494,865,494	100%	3,541,696,692	100%	3,589,155,427	100%	3,637,250,110	100%	3,685,989,261		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	3,413,365,494	100%	3,459,104,592	100%	3,505,456,593	100%	3,552,429,711	100%	3,600,032,270		
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	2	53,000,000	2	53,710,200	2	54,429,917	2	55,159,278	2	55,898,412		
				03	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terkelolanya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5	5	21,000,000	5	21,281,400	5	21,566,571	5	21,855,563	5	22,148,427		
				04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	2	2	7,500,000	2	7,600,500	2	7,702,347	2	7,805,558	2	7,910,153		
				1.14.01.2.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	12,300,000	100%	12,464,820	100%	12,631,849	100%	12,801,116	100%	12,972,651		
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70	70	12,300,000	70	-	70	-	70	-	70	12,801,116	70	-
				05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	70	70	-	70	12,464,820	70	-	70	-	70	-	70	12,972,651
				06	Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya	70	70	-	70	-	70	12,631,849	70	-	70	-	70	-
				09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	4	4	-	2	-	2	-	2	100,000,000	2	-		
			1.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	183,000,000	100%	185,452,200	100%	187,937,259	100%	643,791,097	100%	446,357,724			
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	20	-	20	-	20	-	20	200,000,000	20	-		
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	12	3,000,000	12	3,040,200	12	3,080,939	12	3,122,223	12	3,164,061		
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	12	23,000,000	12	23,308,200	12	23,620,530	12	23,937,045	12	24,257,801		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16	16	0	16	-	16	16	3,335,478	16		
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersekkenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	200	157,000,000	200	159,103,800	200	161,235,791	200	163,396,351	200	165,585,862
				20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	2	2	0	2	-	2	-	2	100,000,000	2	101,340,000
				25	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	2	2	0	2	-	2	-	2	50,000,000	2	50,670,000
				28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2	0	2	-	2	-	2	100,000,000	2	101,340,000
			1.14.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	796,968,000	100%	807,647,371	100%	818,469,846	100%	829,437,342	100%	840,551,802
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	250	250	600,000	250	608,040	250	616,188	250	624,445	250	632,812
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	41,554,160	12	42,110,986	12	42,675,273	12	43,247,122	12	43,826,633
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	754,813,840	100%	764,928,345	100%	775,178,385	100%	785,565,776	100%	796,092,357
			1.14.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	81,000,000	100%	82,085,400	100%	83,185,344	100%	84,300,028	100%	85,429,648
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	7	81,000,000	7	82,085,400	7	83,185,344	7	84,300,028	7	85,429,648
Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangun	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana	1.14.02		Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,31	0,28		0,25		0,24		0,23		0,23	
						TFR (Angka Kelahiran Total)	2,56	2,55		2,54		2,53		2,52		2,52	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ)			1.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (%)			100	-	100	200,000,000	100	-	100	-	100	-
				Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPBPK	Terlaksananya Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPBPK (%)		100	0	100	-	100	-	100	-	100	-
				Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK Tingkat Kab/Kota	Tersusunnya dan Pemanfaatan GDPK Tingkat Kab/Kota (Dokumen)		1		1	-	1		1	-	1	
				Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (%)		100		100	-	100		100		100	
				Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (%)		70		70	100,000,000	70		70		70	
				Penguatan Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal (%)		70		70	-	70		70		70	
				Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (%)	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (%)		70		70	-	70		70		70	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan dan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (%)		80		80	-	80		80		80	
				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Non formal dan Informal	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Non formal dan Informal (%)		80		80	-	80		80		80	
				Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Terimplementasinya Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal (%)		80		80	-	80		80		80	
				Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Terimplementasinya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (%)		80		80	-	80		80		80	
				Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis		80		80	100,000,000	80		80		80	
				Sosialisasi Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Sosialisasi Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		80		80	-	80		80		80	
				Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (%)		80		80	-	80		80		80	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian KKBPB (%)	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program KKBPB		80		80		80		80		80	
			1.14.02.2.02	Pemetaan Penduduk Cakupan Kabupaten/Kota	Perkiraan Penduduk Daerah Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (%)		100		100	200,000,000	100		100		100	
				Perumusan Kependudukan	Parameter Terlaksananya Perumusan Parameter Kependudukan (%)		80		80		80		80		80	
				Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Tersedianya Pengolahan Data Kependudukan (%)		100		100	100,000,000	100		100		100	
				Penyusunan Profil KKBPB	Tersusunnya Profil KKBPB (Dokumen)		1		1		1		1		1	
				Pemetaan Kependudukan	Terlaksananya Pemetaan Kependudukan (%)		80		80		80		80		80	
				Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Tersusunnya Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)		1		1		1		1		1	
				Pengembangan Model solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Pengembangan Model solusi Strategis		80		80		80		80		80	
				Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Terlaksananya Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini) (%)		80		80		80		80		80	
				Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPB di Sektor lain	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPB di Sektor lain (Jumlah)		19		19		19		19		19	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (%)		100		100	-	100		100		100	
				Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Terlaksananya Pemanfaatan Data		100		100	-	100		100		100	
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga (%)		100		100	100,000,000	100		100		100	
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (%)		100		100	-	100		100		100	
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (%)		100		100	-	100		100		100	
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPk	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPk (%)		100		100	-	100		100		100	
			1.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)												
					Persentase peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri (%)	30,76	31.08		31.59		31.18		34.26		34.68	
					Persentase Peserta KB Aktif/MKJP (%)	33,58	34.3		35.75		35.85		35.90		35.90	
					Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) (%)	11,50	11.36		11.22		11.09		10.97		10.86	
			1.14.03.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal (%)		100		100	115,634,038	100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja (%)(%)		70		70		70		70		70	
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		80		80		80		80		80	
				Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Tersedianya Distribusi Sarana KIE Program KKBPK (%)		100		100		100		100		100	
				Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		80		80		80		80		80	
				Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) (Kali)	Terlaksananya Hari Keluarga Nasional (Harganas) (Kali)		2		2		2		2		2	
				Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK (%)	Terlaksananya Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK (%)		80		80	115.634,038	80		80		80	
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rakorcam, Rakordes dan Minikarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rakorcam, Rakordes dan Minikarya (Minilok) (%)		70		70		70		70		70	
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terlaksananya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Pengendalian Program KKBP	Terlaksananya Pengendalian Program KKBP (%)		100		100		100		100		100	
			1.14.03.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (KB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (KB/PLKB) (%)		100	5,673,231,000	100	5,749,252,295	100	5,826,292,276	100	5,904,364,593	100	5,983,483,078
				Pembinaan IMP dan Program KKBP di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program KKBP di lini lapangan oleh PKB/PLKB (%)		80		80		80		80		80	
				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (Orang)		25	5,673,231,000	25	5,749,252,295	25	5,826,292,276	25	5,904,364,593	25	5,983,483,078
				Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk PKB/PLKB	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk PKB/PLKB (%)		100		100		100		100		100	
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (%)		80		80		80		80		80	
			1.14.03.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota (%)		80	38,535,000	80	39,051,369	80	39,574,657	80	40,104,958	80	40,642,364

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (%)		80		80		80		80		80	
				Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB (%)		80		80		80		80		80	
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)		80		80		80		80		80	
				Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (%)		70		70		70		70		70	
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (%)		80	8,535,000	80	8,649,369	80	8,765,271	80	8,882,725	80	9,001,754
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB		80		80		80		80		80	
				Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (%)		100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Jejaringnya (%)	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Jejaringnya (%)		80		80		80		80		80	
				Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta hak-hak reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta hak-hak reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan (%)		80		80		80		80		80	
				Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (%)		80		80		80		80		80	
				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (%)		100	30,000,000	100	30,402,000	100	30,809,387	100	31,222,233	100	31,640,610
				Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran (%)		80		80		80		80		80	
				Peningkatan Kesertaan KB Pria	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan KB Pria (%)		70		70		70		70		70	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1.14.03.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB (%)	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB (%)		80		80		80		80	50,000,000	80	58,362,761
				Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan ber-KB	Terlaksananya Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan ber-KB (%)		80		80		80		80		80	58,362,761
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (%)		80		80		80		80		80	
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Terlaksananya Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB (%)		100		100		100		100		100	
				Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB (%)		80		80		80		80	50,000,000	80	
			1.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah keluarga sejahtera yang mendapat bantuan (Kelompok)	5	5		5		5		6		6	
			1.14.04.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (%)		80		80		80	200,493,460	80		80	100,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS	Tersedianya Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS (%)		70		70		70		70		70		
				Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS (%)	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS (%)		70		70		70		70		70		
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS (%)		70		70		70		70		70		
				Promosi dan Sosialisasi Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (%)		70		70		70	50,000,000	70		70		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK (%)		80		80		80		80		80	
				Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK (%)	Tersedianya Pengembangan Materi IPK (%)		100		100		100	100,000,000	100		100	
				Advokasi dan Promosi IPK	Terlaksananya Advokasi dan Promosi IPK (%)		80		80		80		80		80	50,000,000
				Sosialisasi IPK	Terlaksananya Sosialisasi IPK (%)		80		80		80		80		80	
				Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK (%)		80		80		80		80		80	
			1.14.04.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Oranisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembinaan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Oranisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembinaan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (%)		80		80		80	150,000,000	80		80	100,000,000
				Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS	Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS (%)		80		80		80	50,000,000	80		80	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat Dalam Penggerak Opeasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS (%)	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat Dalam Penggerak Opeasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS (%)		80		80		80		80		80		50,000,000
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarag/UPPKS (%)		80		80		80		80		80		50,000,000
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (%)		80		80		80	100,000,000	80		80		
			5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan		100%		100%		100%		100%		100%		
			5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (%)	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (%)		100%		100%		100%	176,037,525	100%		100%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)		80		80		80	176,037,525	80		80	
								10,279,899,494		10,933,284,185		11,083,777,645		11,202,049,243		11,353,789,290	

11,353,789,290

(0)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21
100%	54,852,799,857	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100%	17,948,956,984	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100%	17,530,388,660	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
2	272,197,806	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
5	107,851,961	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
2	38,518,557	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100%	63,170,436	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
70	25,101,116	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
70	25,437,471	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
70	12,631,849	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
2	100,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100%	1,646,538,280	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
20	200,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
12	15,407,423	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
12	118,123,576	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21
16	3,335,478	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
200	806,321,803	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
2	201,340,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
2	100,670,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
2	201,340,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100%	4,093,074,361	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
250	3,081,485		
12	213,414,173	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100%	3,876,578,703	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100%	416,000,421	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
7	416,000,421	Badan KB, PP dan PA	Kab. Tapsel
	-	Dinas	Kab.
0.23	-		
2.52	-		

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21
100	200,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
1	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
70	100,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
70	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
70	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	100,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	200,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	100,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
1	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
1	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
19	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21
100	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	-	Dinas Dalduk	Kab. Tapsel
100	100,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
34.68	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
35.90	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
10.86	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	115,634,038	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18 70	19 -	20 Dinas Dalduk dan KB	21 Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
2	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	115,634,038	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
70	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21
100	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	29,136,623,242	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
25	29,136,623,242	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	197,908,348	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
70	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	43,834,118	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	154,074,230	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
70	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21
80	108,362,761	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	58,362,761	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	50,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
6	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	300,493,460	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21
80	50,493,460	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
70	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	50,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18 70	19 -	20 Dinas Dalduk dan KB	21 Kab. Tapsel
70	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
70	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
70	50,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100	100,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	50,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	250,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	50,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21
80	50,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	50,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
80	100,000,000	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100%	-	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
100%	176,037,525	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21
80	176,037,525	Dinas Dalduk dan KB	Kab. Tapsel
	54,852,799,857		

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kinerja penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp		
18	19	20	21